BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan dan penyediaan layanan serta fasilitas publik perlu dilakukan sebab dengan adanya hal tersebut dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya perekonomian suatu wilayah. Seiring dengan perkembangan yang ada, terjadi perpindahan penduduk dari pusat kawasan menuju ke wilayah pinggiran yang mana merupakan wilayah pemukiman. Hal tersebut menyebabkan jarak antara pemukiman dan tempat beraktivitas terus mengalami peningkatan, penggunaan akan fasilitas transportasi menjadi lebih besar, serta jumlah rata-rata perjalanan menjadi lebih besar per penduduk per tahun. Studi kelayakan merupakan suatu studi mengenai kelayakan sebuah proyek yang meliputi beberapa aspek yang akan dikaji. Dalam penyajian hasil analisisnya, hasil studi kelayakan harus menampilkan data secara kuantitatif mengenai manfaat yang akan diperoleh dibandingkan dengan sumber daya yang diperlukan sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui apakah proyek tersebut akan berhasil atau tidak, menguntungkan atau tidak, serta layak atau tidak layak.

Dilihat dari jumlah pergerakan masyarakatnya, Kabupaten Pasuruan memiliki arus lalu lintas dan mobilitas masyarakat yang tinggi bersesuaian dengan hasil analisis Tim PKL Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebanyak 49.862 perjalanan dimana tingkat penggunaan kendaraan pribadi masyarakat Kabupaten Pasuruan cukup tinggi yaitu sebesar 70% untuk sepeda motor dan 14% untuk mobil. Salah satu tata guna lahan yang menjadi tarikan perjalanan masyarakat untuk melakukan kegiatan adalah kawasan perkantoran. Perjalanan menuju kawasan perkantoran tidak terbatas hanya dilakukan oleh pegawai perkantoran saja, akan tetapi perjalanan tersebut juga dilakukan oleh masyarakat umum yang membutuhkan jasa dari perkantoran itu. Perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan sebagian besar terletak pada Kawasan Perkantoran

Raci. Pegawai kantor-kantor tersebut bertempat tinggal di sekitar wilayah Kabupaten Pasuruan dan moda transportasi dalam melakukan perjalanan menuju kawasan perkantoran ialah kendaraan pribadi, baik itu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Seiring berjalannya waktu, penggunaan kendaraan pribadi di kawasan ini akan menimbulkan kemacetan, terutama pada jam puncak pagi hari yang mana merupakan jam puncak tertinggi di Kabupaten Pasuruan apabila terjadi secara terus menerus.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan telah melakukan upaya mengenai pelayanan angkutan umum yaitu angkutan pedesaan sesuai Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Nomor: 551/017/424.083/2017 tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuhan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Pasuruan. Namun, hasil analisis yang dilakukan oleh Tim PKL Kabupaten Pasuruan Tahun 2023, pelayanan angkutan umum yang tersedia juga tidak dapat memenuhi kebutuhan akan keinginan pelayanan bagi masyarakat, seperti pemenuhan kepastian akan mendapat angkutan yang mudah, aman, lebih cepat, dan nyaman, terlebih lagi pada Kawasan Perkantoran Raci sudah tidak ada lagi angkutan pedesaan yang melayani trayek tersebut. Oleh karena itu, masyarakat yang di dalamnya juga termasuk pegawai perkantoran memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan mengambil kebijakan untuk memberikan pelayanan angkutan sekolah gratis untuk siswa sekolah di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Pasuruan. Namun, untuk layanan angkutan umum bagi masyarakat khususnya pegawai kantor pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan belum terlaksana.

Dengan adanya upaya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan akan pemenuhan pelayanan transportasi publik melalui angkutan pegawai, dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD) yang mempunyai keleluasan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Dengan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan memiliki kewenangan untuk pengelolaan retribusi dari pelaksanaan angkutan pegawai. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pengelolaan retribusi dari pelaksanaan angkutan pegawai ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan angkutan pegawai serta pengelolaan pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan skripsi yang berjudul **“PERENCANAAN ANGKUTAN PEGAWAI DI KAWASAN PERKANTORAN RACI KABUPATEN PASURUAN”** ini dilakukan untuk mendukung peningkatan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Pasuruan dengan memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat yang ditekankan pada aparat pemerintah daerah di Kawasan Perkantoran Raci. Angkutan khusus pegawai merupakan bagian dari Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Dilakukan perencanaan angkutan khusus dengan konsep *carpooling* yaitu pengguna kendaraan pribadi berbagi kendaraan pada suatu perjalanan sehingga terdapat banyak orang dalam satu rute perjalanan untuk memfasilitasi pegawai. Dengan adanya angkutan khusus pegawai ini diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi, dan dapat dikembangkan serta diterapkan pada penelitian lebih lanjut tentang angkutan umum bagi masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka diidentifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Banyaknya pegawai yang menggunakan kendaraan pribadi, baik itu sepeda motor maupun mobil menuju ke kawasan perkantoran.
2. Tidak adanya angkutan khusus pegawai yang melayani pegawai kantor dinas/badan pemerintah daerah.

3. Tidak tersedianya angkutan umum berupa angkutan pedesaan yang menuju Kawasan Perkantoran Raci Kabupaten Pasuruan.

1.3 Rumusan Masalah

Keberlangsungan aktivitas masyarakat dalam proses pemenuhan kebutuhan tidak dapat dipisahkan dengan peran penting dari transportasi. Transportasi memberikan kemudahan masyarakat untuk melakukan perjalanan ke tempat kerja, sekolah atau universitas, pusat perbelanjaan, kepentingan sosial, dan tempat rekreasi. Perkantoran dan sekolah atau universitas menjadi tarikan perjalanan utama masyarakat karena perjalanan menuju lokasi ini dilakukan terus menerus. Perkantoran pada Kawasan Perkantoran Raci menjadi salah satu tujuan perjalanan masyarakat Kabupaten Pasuruan baik untuk bekerja maupun untuk mendapatkan layanan di kantor tersebut. Permasalahan di bidang transportasi yang dihadapi Kabupaten Pasuruan saat ini yaitu kecenderungan penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat termasuk pegawai kantor pemerintah daerah Kawasan Perkantoran Raci Kabupaten Pasuruan. Penggunaan lahan sekitar kawasan ini yaitu pemukiman, industri, dan sekolah sehingga peningkatan volume lalu lintas pagi dan sore hari juga dipengaruhi oleh perjalanan masyarakat umum. Volume lalu lintas akan terus meningkat dan akhirnya akan mengakibatkan kemacetan pada ruas jalan jika tidak dilakukan perbaikan sedini mungkin. Pelayanan angkutan khusus menjadi salah satu upaya dalam mengurangi volume lalu lintas di ruas jalan yang dilalui ke atau dari kawasan perkantoran. Pelayanan angkutan khusus berfokus pada pegawai kantor pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan, diharapkan dapat dikembangkan dan diimplementasikan untuk perbaikan angkutan pedesaan Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan uraian terhadap permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan utama yang akan dikaji untuk membuat perencanaan angkutan pegawai di Kawasan Perkantoran Raci Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik pengguna angkutan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan di Kawasan Perkantoran Raci?

2. Bagaimana perencanaan rute, titik penjemputan, dan rencana jenis angkutan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan di Kawasan Perkantoran Raci?
3. Bagaimana kinerja operasional pelayanan penyelenggaraan angkutan pegawai?
4. Berapa biaya operasional kendaraan serta tarif yang sesuai untuk angkutan pegawai?
5. Apakah perencanaan angkutan pegawai yang akan dilaksanakan layak atau tidak layak?

1.4 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan pegawai untuk Kawasan Perkantoran Raci Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui karakteristik pengguna angkutan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan di Kawasan Perkantoran Raci;
2. Merencanakan rute, titik penjemputan, dan jenis angkutan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan di Kawasan Perkantoran Raci;
3. Menganalisis dan mengusulkan kinerja operasional pelayanan dalam penyelenggaraan angkutan pegawai;
4. Menghitung biaya operasional kendaraan (BOK) serta tarif angkutan pegawai;
5. Menganalisis kelayakan perencanaan angkutan pegawai yang akan dilaksanakan.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian diharapkan dapat memberikan arah dan fokus yang baik terhadap permasalahan yang sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Batasan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang dikaji adalah adanya perencanaan angkutan pegawai di Kawasan Perkantoran Raci Kabupaten Pasuruan;

2. Zona asal perjalanan adalah perumahan atau pemukiman dan zona tujuan perjalanan adalah kantor pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan di Kawasan Perkantoran Raci;
3. Responden pada penelitian ini adalah pegawai kantor pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan di Kawasan Perkantoran Raci yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan dan tidak pada pengunjung kantor tersebut;
4. Penentuan rute angkutan pegawai dan lokasi tempat henti berbasis tempat tinggal pegawai kantor;
5. Penentuan lokasi tempat perhentian angkutan pegawai tidak termasuk desain halte/tempat henti tetapi hanya berfokus pada penentuan titik lokasi tempat perhentian angkutan pegawai.
6. Penentuan jumlah kebutuhan angkutan pegawai menggunakan jumlah penumpang berdasarkan proyeksi dari jarak tempat tinggal dan pukul tiba pegawai.
7. Dalam penelitian perencanaan angkutan pegawai yang dianalisis berupa jumlah permintaan, rute, menentukan jenis kendaraan, kinerja operasional rencana, dan biaya operasional kendaraan (BOK), serta tarif angkutan pegawai.